SKRIPSI

PERUBAHAN PARADIGMA: MEMPERKUAT KEMBALI PERAN MAHASISWA DALAM PENGAWALAN POLITIK PEMERINTAHAN DI MATA PUBLIK PRODI ILMU POLITIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Program Studi Ilmu Politik

Disusun Oleh :

Rifananda Yulistion Nugroho
NIM.E1052181052

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

SKRIPSI

PERUBAHAN PARADIGMA: MEMPERKUAT KEMBALI PERAN MAHASISWA DALAM PENGAWALAN POLITIK PEMERINTAHAN DI MATA PUBLIK PRODI ILMU POLITIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

Rifananda Yulistion Nugroho
NIM.E1052181052

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

PERUBAHAN PARADIGMA: MEMPERKUAT KEMBALI PERAN MAHASISWA DALAM PENGAWALAN POLITIK PEMERINTAHAN DI MATA PUBLIK PRODI ILMU POLITIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Rifananda Yulistion Nugroho
NIM.E1052181052

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Tanggal 20/6-2025

Dr. Erdi, M.Si
NIP. 196707272005011001

Dosen Pembimbing Pendamping

Tanggal 15/6 2025

Dra. Hj. Endang Indri Listiani, M.Si
NIP.196303241987032001

HALAMAN PENGESAHAN

PERUBAHAN PARADIGMA: MEMPERKUAT KEMBALI PERAN MAHASISWA DALAM PENGAWALAN POLITIK PEMERINTAHAN DI MATA PUBLIK PRODI ILMU POLITIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Oleh:

Rifananda Yulistion Nugroho
NIM.E1052181052

Dipertahankan di : Pontianak
Pada Hari / Tanggal : Selasa, 05 Agustus 2025
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang FISIP UNTAN

Tim Penguji

Ketua

Dr. Erdi, M.Si
NIP.196707272005011001

Sekretaris

Dra. Hj. Endang Indri Listiani, M.Si
NIP.196303241987032001

Pembahas 1

Drs. Abdul Rahim, M.Si
NIP. 196308011990021001

Pembahas 2

Ahirul Habib Padilah, S.IP, M.I.Pol
NIP.199205122022031003

Disahkan Oleh
Dekan FISIP UNTAN

Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP.197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan perubahan paradigma dalam memperkuat kembali peran mahasiswa Prodi Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dalam pengawalan politik pemerintahan di mata publik. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pergeseran dari partisipasi konvensional seperti demonstrasi ke partisipasi berbasis teknologi, seperti media sosial dan petisi online. Mahasiswa kini lebih mengutamakan pendekatan konstruktif, seperti diskusi publik dan advokasi digital, meskipun tantangan seperti hoaks dan literasi digital masih menghambat. Selain itu, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah masih rendah akibat minimnya transparansi kebijakan. Media sosial menjadi sarana utama mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi, meskipun kebebasan berekspresi di ruang digital masih terbatas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mahasiswa memiliki potensi besar sebagai agen perubahan melalui strategi advokasi inklusif, kolaborasi dengan masyarakat sipil, dan pemanfaatan teknologi informasi secara efektif.

Kata Kunci: Perubahan paradigma, peran mahasiswa, pengawalan politik.

ABSTRACT

This study aims to identify and describe the paradigm shift in strengthening the role of students from the Political Science Study Program at Universitas Tanjungpura in overseeing governmental politics from a public perspective. The research employs a descriptive qualitat ive approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicated a shift from conventional forms of participation, such as street demonstrations, toward technology-based participation, including social media engagement and online petitions. Students now tend to prioritize more constructive approaches, such as public discussions and digital advocacy, although challenges such as misinformation (hoaxes) and limited digital literacy continue to hinder their effectiveness. Furthermore, public trust in the government remains low due to a lack of policy transparency. Social media has become the primary platform for students to express their political aspirations, despite ongoing constraints on freedom of expression in digital spaces. This study concludes that students possess significant potential as agents of change through inclusive advocacy strategies, collaboratio n with civil society, and the effective utilization of information technology.
Keywords: Paradigm Shift, Student Role, Political Oversight.

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul ”Perubahan Paradigma: Memperkuat Kembali Peran Mahasiswa Dalam Pengawalan Politik Pemerintahan Di Mata Publik Prodi Ilmu Politik Universitas Tanjungpura“ Pengawalan politik pemerintahan merupakan upaya untuk memastikan stabilitas politik, transparansi, dan akuntabilitas kebijakan publik. Dalam konteks demokrasi, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dan pengawal kebijakan. Namun, paradigma partisipasi mahasiswa telah berubah dari gerakan massa konvensional seperti demonstrasi ke partisipasi berbasis teknologi media sosial, petisi online. Perubahan ini menuntut adaptasi mahasiswa, terutama di Prodi Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, untuk tetap relevan dalam mengawal pemerintahan di mata publik. Rumusan Masalah adalah bagaimana perubahan paradigma memperkuat kembali peran mahasiswa dalam pengawalan politik pemerintahan di Prodi Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Tujuan Penelitian Mengetahui dan mendeskripsikan perubahan paradigma serta strategi untuk memperkuat peran mahasiswa dalam pengawalan politik pemerintahan.

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian meliputi mahasiswa aktif, dan masyarakat. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi sejumlah perubahan dalam dinamika hubungan antara mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah. Pertama, terjadi pergeseran norma dan nilai di masyarakat yang kini lebih

menghargai partisipasi mahasiswa yang bersifat konstruktif, seperti diskusi publik dan advokasi digital, dibandingkan aksi demonstrasi konvensional. Nilai-nilai seperti transparansi dan akuntabilitas kini menjadi lebih diutamakan oleh publik. Kedua, pola partisipasi publik juga mengalami transformasi, di mana mahasiswa cenderung menggunakan pendekatan berbasis teknologi, seperti media sosial dan riset kebijakan, yang dinilai lebih strategis dan terukur. Namun, mereka masih menghadapi tantangan berupa maraknya hoaks serta rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat. Ketiga, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah masih tergolong rendah, yang utamanya disebabkan oleh minimnya transparansi dalam proses perumusan kebijakan serta lambannya respons pemerintah terhadap kritik publik. Keempat, media sosial kini menjadi sarana utama bagi mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi dan mengawal kebijakan publik, meskipun kebebasan berekspresi di ruang digital masih mengalami berbagai pembatasan. Kelima, dalam merespons dinamika sosial, pemerintah sering kali mengambil kebijakan tanpa melibatkan partisipasi publik secara memadai. Namun demikian, tekanan dari mahasiswa dan masyarakat sipil telah mulai mendorong pemerintah untuk lebih terbuka dan responsif. Terakhir, pengakuan terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) semakin menguat di kalangan mahasiswa, yang menggunakannya sebagai landasan moral dalam mengkritisi kebijakan dan menuntut keterbukaan, keadilan, serta partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pemerintahan.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran mahasiswa dalam pengawalan politik pemerintahan telah mengalami perubahan paradigma yang signifikan, dari aksi fisik menuju partisipasi digital yang lebih cerdas, terstruktur, dan berbasis data. Meskipun tantangan seperti pembatasan kebebasan berekspresi dan rendahnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah masih menjadi hambatan, mahasiswa Prodi Ilmu Politik Universitas Tanjungpura memiliki potensi besar sebagai agen perubahan melalui strategi advokasi yang inklusif, kolaborasi dengan masyarakat sipil, serta pemanfaatan media dan teknologi informasi secara efektif. Oleh karena itu, disarankan agar mahasiswa terus meningkatkan kapasitas dalam analisis kebijakan dan literasi digital, serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana kampanye yang edukatif dan konstruktif. Bagi universitas, penting untuk mengintegrasikan pendidikan Hak Asasi Manusia dan politik digital ke dalam kurikulum, serta menciptakan ruang dialog yang produktif antara mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat. Sementara itu, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kebijakan, serta menyediakan ruang partisipasi yang aman dan inklusif bagi mahasiswa sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Rifananda Yulistio Nugroho
Nomor Mahasiswa	: E1052181052
Program Studi	: Ilmu Politik
Jenjang Studi	: Strata satu (S-1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri yang sebelumnya tidak pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun, sepengetahuan saya di dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau penulisan yang pernah di tulis dan diterbitkan orang lain, kecuali kutipan yang secara tertulis telah disebutkan dalam daftar Pustaka.

Pontianak, 18 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Rifananda Yulistio Nugroho

E1052181052

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Dinamika pergerakan sosial dan nasional menjadi pilar penting dalam proses perkembangan sebuah bangsa

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, saya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan ridho-Nya dalam penyelesaian skripsi ini. Setelah melalui proses yang panjang, dengan tulus saya mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Diri saya sendiri, terima kasih telah kuat dan sehat secara fisik maupun mental selama proses pengerjaan skripsi ini.
2. Orangtua saya, yang tiada henti membesarkan saya dengan penuh kasih sayang. Terima kasih atas dukungan, perjuangan, motivasi, dan pengorbanan yang tak terhingga dalam hidup ini, serta doa terbaik demi pendidikan saya.
3. Saudara dan keluarga tercinta yang selalu mendukung dan memberikan nasihat agar skripsi ini dapat segera terselesaikan. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT.

4. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas bantuan, doa, dukungan, dan semangat yang tak pernah berhenti selama saya mengerjakan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kekhadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulisan skripsi yang berjudul : ”**Perubahan Paradigma: Memperkuat Kembali Peran Mahasiswa Dalam Pengawalan Politik Pemerintahan Di Mata Publik Prodi Ilmu Politik Universitas Tanjungpura“** dapat diselesaikan tepat waktunya.

Skripsi ini dibuat sebagai tugas akhir dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Selanjutnya penulisan menyadari akan kekurangan dari skripsi, karena hasil yang dicapai melalui skripsi ini baru merupakan langkah awal dari suatu perjalanan panjang khazanah ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan.

Keberhasilan dalam penulisan Skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang memberikan berbagai bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan proposal ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Herlan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Erdi, M.Si selaku dosen pembimbing pertama dan Dra. Hj. Endang Indri Listiani, M.Si selaku pembimbing kedua yang telah memberikan kemudahan dan arahan, motivasi dan bimbingan selama proses penulisan usulan proposal ini.

3. Wakil Dekan, Bapak/Ibu Dosen, Staf Tata Usaha, Staf Perpustakan, Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Rekan-rekan seluruh Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah menginspirasi terutama rekan-rekan seangkatan 2018 yang telah memberikan semangat dan saran dalam penulisan proposal ini.

Semoga segala kebaikan , bantuan, dan dorongan yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan dari Allah SWT, dan hasil karya yang peneliti lakukan ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran serta manfaat yang berarti bagi kita semua yang memerlukan.

Pontianak, 7 Juni 2025

Rifananda Yulistio Nugroho
E1052181052

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **iii**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **iv**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **vii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
GAMBAR ..... **xv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 7
1.3 Rumusan Masalah 8
1.4 Tujuan Penelitian 8
1.5 Manfaat Penelitian 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **10**
2.1 Definisi Konsep 10
2.1.1 Perubahan Paradigma 10
2.1.2 Peran Mahasiswa 12
2.1.3 Pengawalan Politik Pemerintahan 14
2.1.4 Ilmu Politik 16
2.2 Konsep Teori 17
2.2.1 Faktor – Faktor yang mempengaruhi Perubahan Paradigma 17
2.2.2 Indikator Perubahan Paradigma 19
2.3 Hasil Penelitian Yang Relevan 21
2.4 Alur Pikir Penelitian 25
2.5 Pertanyaan Penelitian 26
BAB III METODE PENELITIAN **28**
3.1 Jenis Penelitian 28
3.2 Langkah – Langkah Penelitian 29
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 31
3.3.1 Lokasi Penelitian 31
3.3.2 Waktu Penelitian 31
3.4 Subjek dan Objek Penelitian 32
3.4.1 Subjek Penelitian 32
3.4.2 Objek Penelitian 32
3.4.3 Teknik Pengumpulan Data 32
3.5 Instrument / Alat Pengumpulan Data 35
3.6 Analisis Data 35
3.6.1 Keabsahan Data 36
3.6.2 Teknik Analisis Data 37
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN **40**
4.1 Gambaran Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 40
4.2 Kondisi Geografis dan Demografis 43
4.2.1 Kondisi Geografis 43
4.2.2 Kondisi Demografis 44

4.3 Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Struktur Organisasi....50
4.3.1 Visi dan Misi FISIP UNTAN....50
4.3.2 Struktur Organisasi....52
4.4 Bentuk Wilayah....52
4.5 Sarana dan Prasarana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik....53
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN....55
5.1 Hasil Penelitian....55
5.1.1 Indikator Dari Perubahan Norma Dan Nilai Masyarakat Pada Perubahan Paradigma: Memperkuat Kembali Peran Mahasiswa Dalam Pengawalan Politik Pemerintahan Di Mata Publik Prodi Ilmu Politik Universitas Tanjungpura....57
5.1.2 Indikator Dari Perubahan Pola Partisipasi Publik Pada Perubahan Paradigma: Memperkuat Kembali Peran Mahasiswa Dalam Pengawalan Politik Pemerintahan Di Mata Publik Prodi Ilmu Politik Universitas Tanjungpura....64
5.1.3 Indikator Dari Tingkat Kepercayaan Terhadap Pemerintah Pada Perubahan Paradigma: Memperkuat Kembali Peran Mahasiswa Dalam Pengawalan Politik Pemerintahan Di Mata Publik Prodi Ilmu Politik Universitas Tanjungpura....71
5.1.4 Indikator Dari Perubahan Media dan Teknologi Informasi Pada Perubahan Paradigma: Memperkuat Kembali Peran Mahasiswa Dalam Pengawalan Politik Pemerintahan Di Mata Publik Prodi Ilmu Politik Universitas Tanjungpura....78
5.1.5 Indikator Dari Perubahan Keputusan dan Respons Pemerintah Pada Perubahan Paradigma: Memperkuat Kembali Peran Mahasiswa Dalam Pengawalan Politik Pemerintahan Di Mata Publik Prodi Ilmu Politik Universitas Tanjungpura....82
5.1.6 Indikator Dari Pengakuan dan Pemahaman Terhadap HAM Pada Perubahan Paradigma: Memperkuat Kembali Peran Mahasiswa Dalam Pengawalan Politik Pemerintahan Di Mata Publik Prodi Ilmu Politik Universitas Tanjungpura....87
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN....94
6.1 Kesimpulan....94
6.2 Saran....96
DAFTAR PUSTAKA....1

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Seminar Tahun 2024-2025 31
Tabel 4. 1 Batas Wilayah FISIP UNTAN.....45
Tabel 4. 2 Nama-Nama Dosen FISIP UNTAN 46

GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Pikir Penelitian 25
Gambar 4. 1 Peta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 102
Lampiran 2 103
Lampiran 3 109
Lampiran 4 110
Lampiran 5 112
Lampiran 6 114

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengawalan politik pemerintahan merupakan upaya pemerintah dalam mengatur, mengawasi, dan memengaruhi proses politik di negara tertentu. Hal ini mencakup berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan stabilitas politik, menegakkan kebijakan publik, dan mempengaruhi arah kebijakan serta keputusan politik yang diambil(Thoha 2017). Pemerintah tidak hanya terlibat dalam pembuatan kebijakan publik yang memengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dan mengatur media massa, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menegakkan hukum terkait bidang politik. Ini mencakup penanganan kasus-kasus pelanggaran seperti korupsi atau penipuan dalam proses pemilihan(Fitriyah 2019). Dalam sebuah masyarakat demokratis, pengawalan politik adalah bagian integral dari fungsi pemerintah yang bertujuan untuk memastikan stabilitas politik, perlindungan hak asasi manusia, dan keberlanjutan proses politik yang demokratis. Pengawalan politik tidak hanya terbatas pada wilayah domestik suatu negara, tetapi juga melibatkan interaksi dengan komunitas internasional untuk mempengaruhi agenda politik global. Namun, penting untuk diingat bahwa pengawalan politik haruslah dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari, seperti kebebasan berpendapat, partisipasi publik yang adil, dan keadilan dalam sistem politik (Indrayana 2007).

Dalam kerangka demokrasi kebebasan berpendapat adalah hak yang fundamental bagi setiap warga negara. Hal ini memungkinkan individu untuk

mengemukakan pendapat mereka tanpa takut akan pembalasan atau penindasan dari pihak pemerintah. Pengawalan politik yang mematuhi prinsip ini akan memastikan pluralitas ide dan pandangan politik dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat memperkaya proses pembuatan keputusan politik dan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif(Nuna and Moonti 2019). Selain kebebasan berpendapat, partisipasi publik yang adil juga merupakan unsur penting dalam pengawalan politik yang demokratis. Partisipasi publik yang mencakup berbagai kelompok masyarakat memastikan representasi yang lebih baik dalam proses politik dan memperkuat legitimasi keputusan politik yang diambil oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap proses politik, tanpa adanya diskriminasi atau hambatan yang tidak adil(Warong 2020).

Tidak hanya dalam lingkup nasional, tetapi pemerintah juga memiliki peran dalam diplomasi politik di tingkat internasional. Melalui diplomasi politik, sebuah negara dapat memengaruhi agenda politik global, membangun kemitraan, dan menyelesaikan konflik antar negara dengan cara yang damai. Namun, dalam melakukan diplomasi politik, prinsip-prinsip demokratis harus tetap dijunjung tinggi, termasuk dalam interaksi dengan negara-negara otoriter atau tidak demokratis(Kusuma 2023). Meskipun pengawalan politik merupakan bagian yang integral dalam menjaga stabilitas politik, namun hal ini juga memiliki potensi untuk disalahgunakan atau digunakan untuk kepentingan politik yang sempit. Pengawalan politik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dapat membahayakan

kebebasan individu, merusak integritas proses politik, dan mengancam eksistensi demokrasi itu sendiri.

Penyalahgunaan pengawalan politik termasuk penindasan terhadap oposisi politik, pelanggaran hak asasi manusia, manipulasi hasil pemilihan, dan korupsi dalam lembaga-lembaga politik. Tindakan-tindakan semacam ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan melemahkan fondasi demokrasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk menjalankan pengawalan politik dengan transparan, akuntabel, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi yang kokoh(Aswandi and Roisah 2019). Dalam menjaga keseimbangan antara pengawalan politik dan prinsip-prinsip demokrasi, lembaga-lembaga independen seperti lembaga pengawas pemilu, ombudsman, dan lembaga keuangan negara memainkan peran yang sangat penting. Lembaga-lembaga ini bertugas untuk memastikan bahwa pengawalan politik dilakukan dengan integritas dan sesuai dengan hukum, serta memberikan perlindungan kepada warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan politik(Nugroho 2012).

Perubahan paradigma dalam peran mahasiswa dalam pengawalan politik pemerintahan mencerminkan evolusi yang substansial dalam cara mereka berpartisipasi dalam proses politik(Tabrani 2016). Mahasiswa memiliki kecenderungan yang kuat untuk terlibat dalam gerakan massa atau demonstrasi jalanan sebagai upaya protes terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai atau tidak adil. Dalam konteks sejarah, ini tercermin dalam sejumlah besar gerakan mahasiswa yang ikut serta dalam perubahan politik dan sosial, seperti gerakan mahasiswa pada tahun 1968 di berbagai belahan dunia yang menyoroti isu-

isu seperti hak sipil, perang Vietnam, dan perubahan sosial(Oksinata 2010). Namun, dengan masuknya zaman digital, terjadi pergeseran signifikan dalam fokus dan strategi partisipasi mahasiswa dalam politik. Teknologi informasi dan komunikasi telah membuka pintu untuk bentuk-bentuk baru aktivisme yang memanfaatkan kekuatan internet dan media sosial. Seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan penetrasi perangkat seluler, mahasiswa kini dapat mengambil peran yang lebih aktif dalam proses politik melalui platform daring. Mereka menggunakan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan pesan politik, mengorganisir kampanye, dan memobilisasi dukungan massa dengan cepat dan efisien(Oksinata 2010).

Selain itu peningkatan dalam penggunaan teknologi untuk tujuan advokasi politik yang lebih spesifik. Misalnya, melalui petisi online, blog politik, atau platform khusus yang dirancang untuk menggalang dukungan untuk isu-isu tertentu. Dengan kemampuan untuk menghubungkan dengan cepat dan mudah dengan sesama mahasiswa serta masyarakat umum, para aktivis mahasiswa dapat memperluas jangkauan dan dampak dari usaha politik mereka. Tidak hanya itu, mahasiswa juga memanfaatkan teknologi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah dengan lebih efektif. Mereka menggunakan data dan informasi yang tersedia secara online untuk menganalisis kebijakan publik dan memperdebatkan isu-isu politik dengan lebih mendalam. Ini membantu mereka memperkuat argumen mereka dan membuat intervensi yang lebih terarah dalam proses kebijakan(Nuna and Moonti 2019).

Saat ini, mahasiswa lebih sering memilih untuk terlibat dalam kegiatan politik secara mandiri, seperti ikut serta dalam kampanye online dan

menandatangani petisi di platform daring. Fenomena ini mencerminkan pemanfaatan teknologi dan media sosial sebagai alat utama untuk menyuarakan pandangan politik mereka. Berkat perkembangan teknologi, mahasiswa dapat dengan cepat dan efisien menyebarkan ide-ide mereka kepada khalayak secara luas tanpa perlu menggelar demonstrasi di jalanan yang memerlukan banyak waktu dan tenaga. Walaupun begitu, perubahan ini juga menunjukkan bahwa minat mahasiswa dalam demonstrasi jalanan yang besar-besaran semakin menurun. Oleh karena itu, pergeseran ini menandai sebuah perubahan dalam cara mahasiswa terlibat dalam pengawalan politik pemerintahan, dari partisipasi dalam gerakan massa menuju ke partisipasi politik individu yang lebih didorong oleh teknologi(Framanik 2019). Penggunaan teknologi ini membuka peluang baru bagi mahasiswa untuk terlibat dalam politik dengan cara yang lebih fleksibel, memungkinkan mereka berkontribusi pada isu-isu politik yang mereka anggap penting tanpa harus meninggalkan kampus atau mengorbankan waktu belajar. Sebagai contoh, menggunakan media sosial, mahasiswa dapat menyebarkan informasi tentang kampanye politik, menggalang dukungan, dan berdiskusi dengan sesama mahasiswa serta masyarakat umum tanpa terkendala oleh batasan geografis

Perubahan paradigma ini menandai transformasi dalam cara mahasiswa melibatkan diri dalam pengawalan politik pemerintahan. Gerakan massa sering menjadi bentuk utama protes mahasiswa, namun kini, partisipasi politik individual yang lebih berorientasi pada teknologi semakin mendominasi. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa mahasiswa telah kehilangan semangat atau kepedulian terhadap isu-isu politik. Sebaliknya, mereka masih aktif dalam menyuarakan

pendapat mereka, tetapi melalui platform yang lebih sesuai dengan zaman mereka dan memanfaatkan alat yang tersedia secara efektif. Selain itu, pergeseran ini juga mencerminkan perubahan dalam dinamika politik secara keseluruhan, di mana penggunaan teknologi telah menjadi kekuatan yang semakin dominan dalam memengaruhi opini publik dan membentuk agenda politik. Mahasiswa sebagai bagian dari generasi digital, secara alami mengadaptasi diri mereka ke dalam lingkungan politik yang semakin terhubung secara digital. Mereka memanfaatkan kekuatan internet dan media sosial untuk menjadi agen perubahan dan menyuarakan aspirasi mereka dengan lebih efektif.

Dalam Program Studi Ilmu Politik pemahaman dan keterlibatan mahasiswa dalam pengawalan politik pemerintahan menjadi sangat penting. Mahasiswa Ilmu Politik tidak hanya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang sistem politik, proses kebijakan publik, dan dinamika politik lokal maupun global, tetapi juga memahami implikasi kebijakan terhadap masyarakat secara umum. Dengan pemahaman ini, mahasiswa memiliki potensi besar untuk berperan sebagai katalisator perubahan dan pengawal kebijakan yang efektif. Mereka mampu menganalisis isu-isu politik dengan sudut pandang yang kritis dan membantu masyarakat untuk memahami implikasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Melalui partisipasi aktif dalam forum-forum diskusi, riset, dan advokasi, mahasiswa Ilmu Politik dapat menjadi suara yang berpengaruh dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, mahasiswa Ilmu Politik bukan hanya menjadi agen perubahan dalam lingkup akademis, tetapi juga

dalam meningkatkan kualitas kehidupan politik dan sosial masyarakat secara keseluruhan.

Dalam upaya untuk memperkuat kembali peran mahasiswa dalam pengawalan politik pemerintahan di mata publik, khususnya dalam konteks Program Studi Ilmu Politik. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan yang menggabungkan tradisi partisipasi politik konvensional dengan inovasi teknologi dan strategi baru dalam berkomunikasi dan menyuarakan aspirasi politik. Selain itu, pendekatan pendidikan politik yang holistik dan berorientasi pada pemberdayaan mahasiswa juga menjadi kunci dalam membangun kesadaran politik yang kuat dan kritis di kalangan mahasiswa Ilmu Politik. Oleh sebab itu maka penulis tertarik untuk mengambil judul ini sebagai masalah penelitian yaitu tentang ”Perubahan Paradigma: Memperkuat Kembali Peran Mahasiswa Dalam Pengawalan Politik Pemerintahan Di Mata Publik Prodi Ilmu Politik Universitas Tanjungpura”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan dalam Perubahan Paradigma: Memperkuat Kembali Peran Mahasiswa Dalam Pengawalan Politik Pemerintahan Di Mata Publik Prodi Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

1. Menurunnya partisipasi mahasiswa dalam aktivitas politik konvensional menunjukkan bahwa paradigma baru belum sepenuhnya menggantikan pola partisipasi konvensional yang memiliki dampak kuat dalam pengawalan politik pemerintahan?
2. Keterbatasan dalam penggunaan teknologi menghalangi mahasiswa untuk memanfaatkan teknologi dengan optimal dalam menyuarakan aspirasi

politik mereka meskipun terjadi pergeseran menuju partisipasi politik yang lebih digital?

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perubahan Paradigma: Memperkuat Kembali Peran Mahasiswa Dalam Pengawalan Politik Pemerintahan Di Mata Publik Prodi Ilmu Politik Universitas Tanjungpura?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Perubahan Paradigma: Memperkuat Kembali Peran Mahasiswa Dalam Pengawalan Politik Pemerintahan Di Mata Publik Prodi Ilmu Politik Universitas Tangjungpura?

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Penelitian Teoritis

   Berdasarkan manfaat secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan pemikiran dan pengalaman penelitian serta berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian ilmu politik.

2. Manfaat Penelitian Praktis

   Sebagai salah satu memperkuat kembali peran mahasiswa dalam pengawalan politik pemerintahan di mata publik, khususnya dalam

Program Studi Ilmu Politik dalam meningkatnya kualitas partisipasi politik mahasiswa.